

Overview I-Account APBN

Pendapatan

Rp11,5 T (796,8%)
▼ -33,0% (yoy)

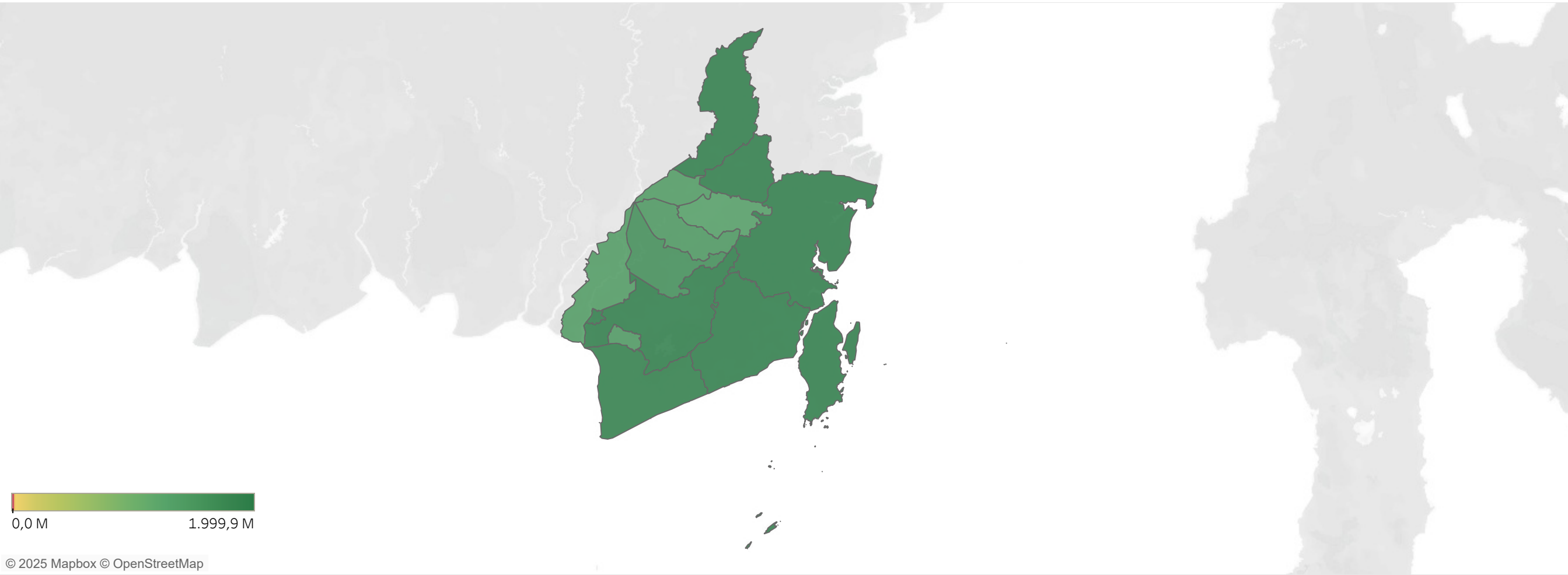
Belanja

Rp33,3 T (80,9%)
▼ -0,6% (yoy)

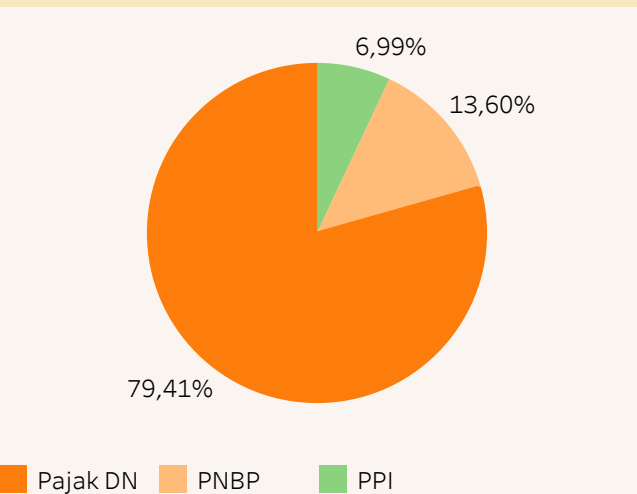
Defisit

Rp-21,8 T (54,9%)
▲ 33,3% (yoy)

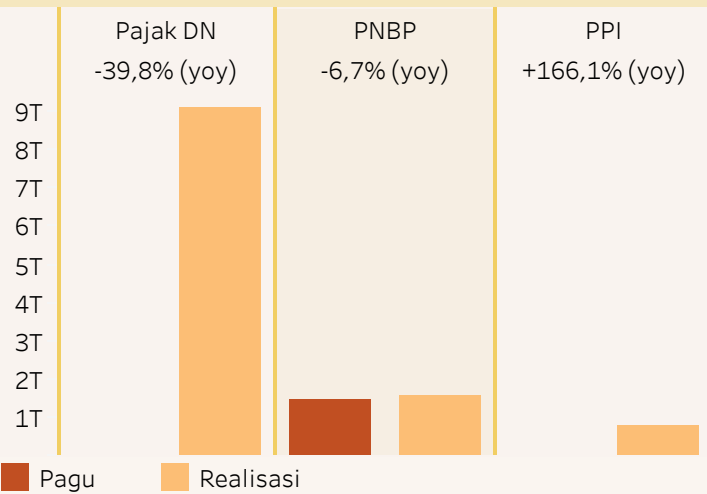
Peta Realisasi Belanja Negara per Wilayah



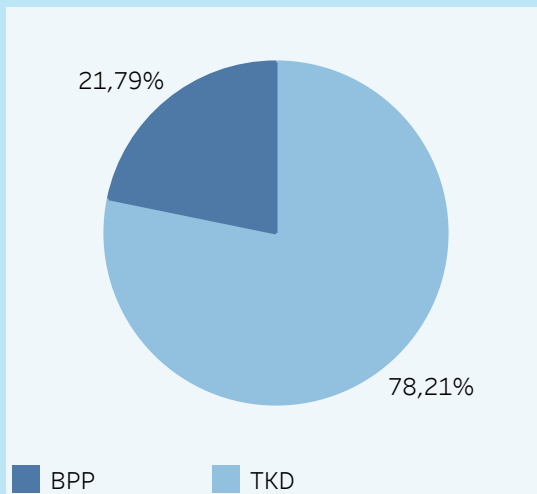
Persentase Komposisi Pendapatan



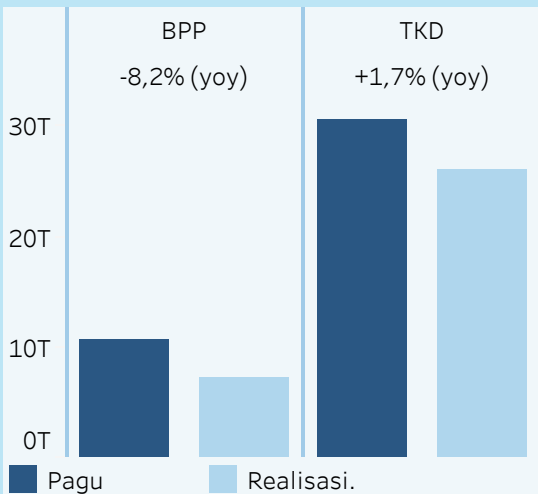
Realisasi per Jenis Pendapatan



Persentase Komposisi Belanja



Realisasi per Jenis Belanja



Pendapatan Regional

	Realisasi Y-1	Realisasi	% Growth
Provinsi Kalimantan Selatan	17,2T	11,5 T	▼ 32,97%
Grand Total	17,2T	11,5 T	▼ 32,97%

Belanja Regional

	Pagu Y-1	Realisasi Y-1	% thdp Pagu Y-1	Pagu	Realisasi	% thdp Pagu	% Growth
Provinsi Kalimantan Selatan	41,7T	33,5T	80,5%	41,2T	33,3 T	80,9%	▼ 0,60%
Grand Total	41,7T	33,5T	80,5%	41,2T	33,3 T	80,9%	▼ 0,60%

Kinerja 10 KL Pagu Tertinggi

		Pagu (KL)	Realisasi (KL)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	45,37%	1,87T	0,85T
KEMENTERIAN AGAMA	99,16%	1,62T	1,61T
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	86,47%	1,48T	1,28T
KEMENTERIAN PERTANIAN	18,15%	1,45T	0,26T
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	71,01%	1,16T	0,82T
KEMENTERIAN PERTAHANAN	91,55%	0,71T	0,65T
MAHKAMAH AGUNG	89,66%	0,30T	0,27T
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	67,89%	0,23T	0,16T
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	79,21%	0,23T	0,18T

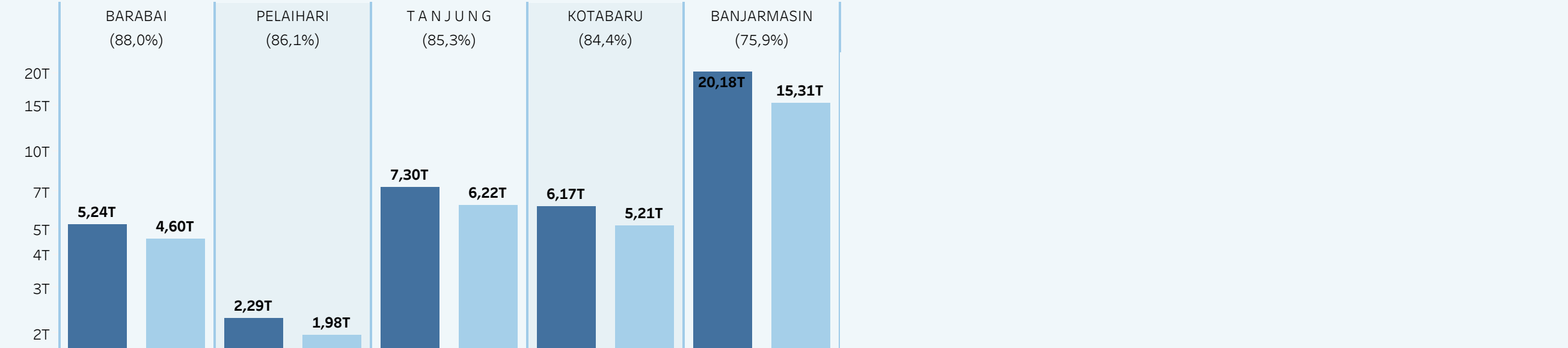
5 KL Persentase Realisasi Tertinggi

	Pagu (KL)	Realisasi (KL)
KEMENTERIAN AGAMA (99,16%)	1,62T	1,61T
KOMISI PEMILIHAN UMUM (93,67%)	0,11T	0,11T
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA (93,11%)	0,20T	0,19T
KEMENTERIAN PERTAHANAN (91,55%)	0,71T	0,65T
MAHKAMAH AGUNG (89,66%)	0,30T	0,27T

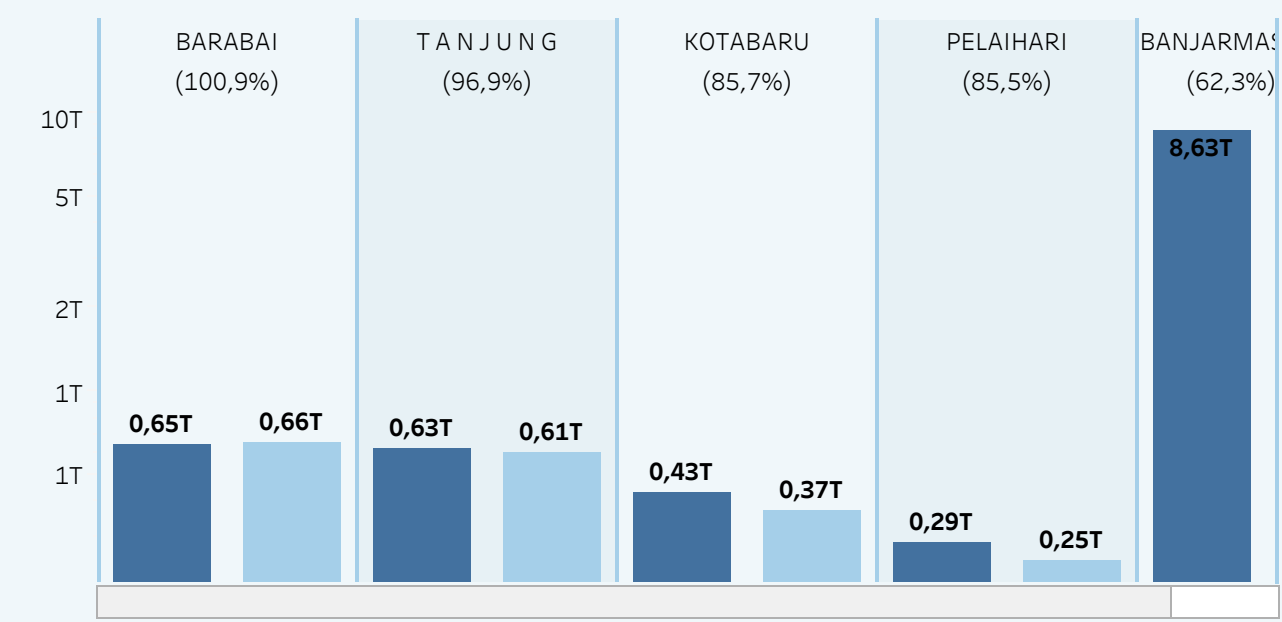
5 KL Persentase Realisasi Terendah

	Pagu (KL)	Realisasi (KL)
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN (0,00%)	0,00T	0,00T
KEMENTERIAN KOPERASI (0,00%)	0,02T	0,00T
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (0,00%)	0,00T	0,00T
KEMENTERIAN PERTANIAN (18,15%)	1,45T	0,26T
BADAN PANGAN NASIONAL (32,33%)	0,00T	0,00T

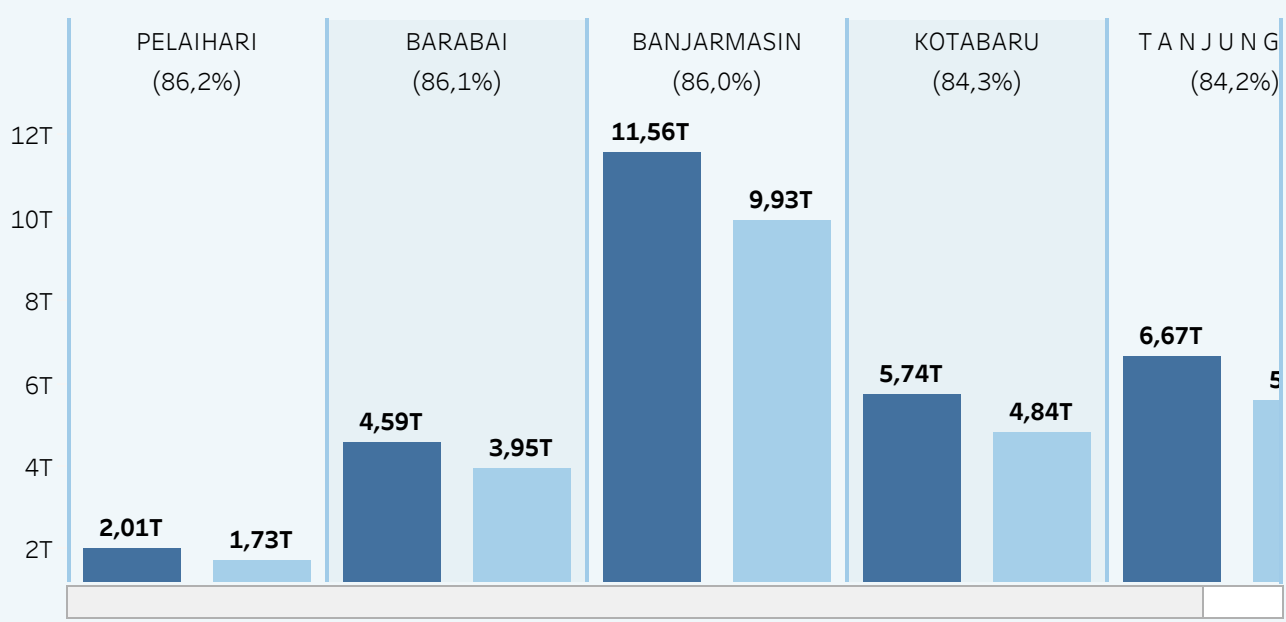
Kinerja Belanja KPPN



Kinerja BPP per KPPN



Kinerja TKD per KPPN



HASIL ANALISIS ISU FISKAL REGIONAL

Analisis Fiskal Regional

A | Perkembangan Pendapatan Negara s.d 21 November 2025

Kinerja Pendapatan Negara sebesar Rp11,5 triliun (52,17%) dari target pendapatan negara sebesar Rp22,04 triliun, terkontraksi 32,97% yoy. Realisasi Pajak Dalam Negeri mencapai 44,84% (Rp 9,13 triliun), Pajak Perdagangan Internasional mencapai 309,35% (Rp803,60 miliar), serta PNBP mencapai 110,38% (Rp1,56 triliun). Pendapatan negara didominasi oleh Pajak Dalam Negeri (79,41%).

B | Perkembangan Belanja Negara s.d 21 November 2025

- Kinerja Belanja Negara sebesar Rp33,3 triliun (80,9%) dari pagu Rp41,2 triliun, terkontraksi 0,6% yoy.** Realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai 68,3% (Rp7,26 triliun) dari pagu Rp10,63 triliun, terkontraksi 8,2% yoy dan Transfer ke Daerah mencapai 85,3% (Rp26,06 triliun) dari pagu Rp30,55 triliun, tumbuh 1,7% yoy. Belanja Negara didominasi oleh Transfer ke Daerah (78,21%).
- Kinerja Belanja 10 K/L Pagu Tertinggi,** Kementerian Pekerjaan Umum merupakan K/L dengan pagu tertinggi yaitu Rp1,87 triliun, dengan realisasi mencapai 45,37% (Rp0,85 triliun). Kementerian Agama menjadi K/L yang memiliki kinerja realisasi belanja tertinggi yaitu 99,16% (Rp1,61 triliun) dari pagu Rp1,62 triliun. Sementara, Kementerian Pertanian menjadi K/L yang memiliki kinerja realisasi belanja terendah dengan realisasi baru 18,15% (Rp0,26 triliun) dari pagu Rp1,45 triliun.
- Kinerja Belanja 5 K/L Tertinggi dan Terendah,** kinerja penyerapan tertinggi dicapai oleh Kementerian Agama dengan realisasi 99,16% (Rp1,61 triliun) dari pagu Rp1,62 triliun. Sementara, kinerja penyerapan terendah oleh Kementerian Pertanian dengan realisasi 18,15% (Rp0,26 triliun) dari pagu Rp1,45 triliun. Dan untuk Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Ketenagakerjaan realisasinya masih 0%.
- Kinerja KPPN,** Kinerja penyerapan tertinggi dicapai oleh KPPN Barabai dengan realisasi sebesar 88,0% (Rp4,6 triliun) dari pagu Rp5,24 triliun. Sementara, kinerja penyerapan terendah berada di KPPN Banjarmasin dengan realisasi 75,9% (Rp15,31 triliun) dari pagu Rp20,18 triliun.

Isu dan Rekomendasi Fiskal Regional

A | Isu Pendapatan Negara, meliputi:

Penerimaan pajak di Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan 31 Oktober 2025 sebesar Rp9,08 triliun atau 44,57% dari target Rp20,36 triliun dengan pertumbuhan terkontraksi 32,49%. Jika dilihat penerimaan per jenis pajak PPh Non Migas, PPN & PPnBM dan PBB mengalami kontraksi secara yoy,

sedangkan pajak lainnya mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi 12.522,84% karena adanya akun jenis pajak baru yaitu deposit pajak.

B | Rekomendasi Pendapatan Negara, diperlukan:

Direktorat Jenderal Pajak perlu melakukan langkah terpadu yang berfokus pada penguatan basis pajak utama yang saat ini melemah, khususnya PPh Nonmigas, PPN & PPnBM, serta PBB, melalui intensifikasi kepatuhan wajib pajak berbasis data risk profiling, optimalisasi pengawasan transaksi sektor unggulan daerah (pertambangan, perkebunan, perdagangan), serta percepatan penagihan piutang pajak.

C | Isu Belanja Negara, meliputi:

Beberapa satker dengan DIPA sumber PNBPN memiliki trend penerimaan PNBPN yang meningkat tajam di Triwulan IV/Akhir Tahun, terutama satker lingkup Kementerian Diktisaintek, dan sesuai dengan ketentuan penggunaan dan pemanfaatan realisasi PNBPN di atas target awal, satker hanya dapat memanfaatkan kelebihan realisasi penerimaan PNBPN tersebut pada tahun anggaran berjalan.

D | Rekomendasi Belanja Negara, diperlukan:

Satker perlu melakukan perhitungan dan perencanaan yang matang terkait pemanfaatan penggunaan anggaran sumber Realisasi Penerimaan PNBPN di atas target dalam keterbatasan waktu yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna menciptakan pengelolaan dan pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien, akurat dan akuntabel dan tetap berkoordinasi dengan Kantor Vertikal DJPb selaku Financial Advisor bagi K/L.

HASIL ANALISIS TEMATIK REGIONAL

Analisis Tematik Regional

A | FLPP, Terdapat peningkatan unit yang dibangun periode sebelumnya 9.869 menjadi 10.076 unit, Peningkatan realisasi FLPP periode sebelumnya 9.065 unit menjadi 9.178 unit, peningkatan jumlah lokasi periode sebelumnya 650 lokasi menjadi 654, jumlah Kab./Kota yang ada program FLPP 13 Kab./Kota, dan nominal FLPP mengalami kenaikan periode sebelumnya sebesar Rp1.183.881.285.365,- menjadi Rp1.198.688.107.865,-.

B | Giant Sea Wall, di Kalimantan Selatan tidak terdapat program prioritas Giant Sea Wall.

C | Koperasi Desa Merah Putih, Progres realisasi anggaran masih belum terdapat realisasi dari alokasi pagu/perkiraan alokasi dana sebesar Rp6.039 M

Progres Fase I

Jumlah desa dan kelurahan yang sudah membentuk Koperasi Merah Putih dan jumlah koperasi desa dan kelurahan yang sudah berbadan hukum adalah sudah maksimal seperti periode berikutnya yaitu sebanyak 2.013

Progres Fase II

2. Jumlah koperasi yang sudah memiliki akunsimkopdes(microsite) sebanyak 2.013
3. Jumlah koperasi yang sudah memiliki gerai (minimal 1 gerai) mengalami kenaikan periode sebelumnya 494 menjadi 544.
4. Jumlah keseluruhan gerai koperasi yang sudah aktif semula 568 menjadi 620.
5. Jumlah koperasi melakukan permohonan proposal bisnis tidak mengalami perubahan yaitu 115.
6. Jumlah permohonan proposal bisnis tidak berubah yaitu 364.

D | Sekolah Rakyat, Realisasi Jumlah Sekolah Rakyat yang sudah berjalan tetap seperti periode sebelumnya sebanyak 3 SR. Saat ini, target jumlah sekolah rakyat sebanyak 3 SR.

Telah dilaksanakan Kontrak MYC pada tanggal 17 November 2025 untuk pembangunan 3 Sekolah Rakyat di Kota Banjarbaru, Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Tanah Bumbu.

E | Revitalisasi Sekolah, Belum ada perubahan/tetap dibandingkan periode sebelumnya. pelaksanaan revitalisasi untuk Jumlah target sekolah yang direvitalisasi adalah 64 Sekolah yang terdiri dari 46 madrasah dan 18 sekolah di daerah transmigrasi.

Progres target 46 madrasah adalah 14 madrasah ditargetkan selesai tahun ini dan sisanya 32 madrasah

baru tahap perencanaan dan ditargetkan selesai tahun depan melalui skema multy years contract (MYC).

Telah dilaksanakan Kontrak MYC pada tanggal 17 November 2025 untuk pelaksanaan 3 paket revitalisasi sekolah

Telah dilaksanakan monev dan survei bersama Tim Direktorat Pelaksanaan Anggaran pada SMKN 1 Banjarmasin pada tanggal 20 November 2025.

F | SMA Unggul Garuda, belum ada perubahan/tetap dibandingkan periode sebelumnya. Telah dilakukan peresmian SMA Garuda Transformasi pada SMAN Banua, oleh Menteri Ekonomi Kreatif pada tanggal 8 Oktober 2025. Peresmian SMA Garuda di Kalsel ini merupakan bagian dari peluncuran serentak di 16 Sekolah Se-Indonesia yang terdiri dari 4 sekolah baru dan 12 sekolah transformasi.

G | Ketahanan Pangan, Terdapat kenaikan realisasi anggaran untuk mendukung program ketahanan pangan semula Rp590,35M (31,76%) menjadi Rp615,61 M (33,16%) dari pagu sebesar Rp1,86 T.

H | Ketahanan Energi, belum ada perubahan/tetap dibandingkan periode sebelumnya. Pemerintah Kab. HST sedang mengusulkan untuk pembangunan Bendungan Pancur Hanau senilai Rp30 miliar. Bendungan ini merupakan infrastruktur vital yang tidak hanya berfungsi sebagai penyedia air baku, irigasi, dan pengendali banjir, tetapi juga berperan penting dalam penyediaan energi.

Isu dan Rekomendasi Tematik Regional

A | Isu FLPP, meliputi:

Pembeli rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bebas BPHTB karena kebijakan pemerintah telah menghapuskan biaya tersebut hingga akhir tahun 2025, namun praktek di lapangan belum berjalan dengan baik karena proses pengurusan yang cukup rumit.

B | Rekomendasi FLPP, diperlukan:

Pemerintah perlu memastikan implementasi pembebasan BPHTB bagi pembeli rumah bersubsidi MBR berjalan efektif melalui penyederhanaan alur administrasi, digitalisasi proses pengajuan, serta peningkatan koordinasi antara pemda, pengembang, dan lembaga pembiayaan. Pemda perlu didorong untuk menetapkan standar pelayanan yang jelas dan batas waktu pemrosesan sehingga manfaat kebijakan pembebasan BPHTB hingga akhir 2025 dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

C | Isu Giant Sea Wall, meliputi:

Di Kalimantan Selatan tidak terdapat program prioritas Giant Sea Wall

D | Rekomendasi Giant Sea Wall, diperlukan:

Di Kalimantan Selatan tidak terdapat program prioritas Giant Sea Wall

E | Isu Koperasi Desa Merah Putih, meliputi:

Terdapat permintaan pembayaran honorarium tenaga Business Assistance (BA) pada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan telah diterbitkan Pedoman Tindak Lanjut Atas Pembayaran Honorarium Tenaga Business Assistance (BA) KDKMP oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran NOMOR ND-1594/PB.2/2025.

F | Rekomendasi Koperasi Desa Merah Putih, diperlukan:

KPPN agar mendorong dan memberikan edukasi kepada satker pengampu dan yang mendapatkan alokasi dana pembayaran Honorarium Tenaga Business Assistance (BA) KDKMP untuk mempersiapkan dokumen pendukung dan memastikan pembayaran sesuai ketentuan termasuk ketentuan pelaksanaan LLAT 2025.

G | Isu Sekolah Rakyat, meliputi:

Pelaksanaan pembangunan 3 Sekolah Rakyat di Kota Banjarbaru, Kab. Barito Kuala dan Kab. Tanah Bumbu perlu dilakukan mitigasi dan antisipasi yang cermat dari segala risiko yang berakibat pada keterlamba

H | Rekomendasi Sekolah Rakyat, diperlukan:

- Perlunya perencanaan matang, penjadwalan pekerjaan yang realistis dan berbasis prioritas, serta penguatan koordinasi antara PPK, penyedia jasa, pemerintah daerah, dan pengawas lapangan agar potensi hambatan dapat diidentifikasi dan ditangani sejak dini;
- Dilakukan monitoring harian, penyiapan rencana kontinjensi terhadap cuaca atau gangguan material, serta penerapan standar mutu yang ketat.

I | Isu Revitalisasi Sekolah, meliputi:

Program

Hasil Terbaik Cepat (PHTC) melalui program revitalisasi sekolah dan pengadaan peralatan Interactive Flat Panel (IFP) di Kalimantan

Selatan telah membantu menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif dan menarik demi mewujudkan Pe

J | Rekomendasi Revitalisasi Sekolah, diperlukan:

Diperlukan penguatan kapasitas pendidik dalam pemanfaatan peralatan Interactive Flat Panel (IFP) melalui pelatihan berkala serta pendampingan teknis di satuan pendidikan penerima, serta partisipasi aktif semua pihak untuk memastikan kualitas sarana dan prasarana tetap terjaga serta benar-benar mendukung terciptanya proses pembelajaran yang interaktif dan menarik.

K | Isu SMA Unggul Garuda meliputi:

Diharapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan benar-benar memanfaatkan kesempatan baik ini untuk melahirkan generasi muda unggul yang '*Go Internasional*' dan kembali ke daerah untuk membangun Kalimantan Selatan.

L | Rekomendasi SMA Unggul Garuda, diperlukan:

Perlu disiapkan program beasiswa, pertukaran pelajar, dan pelatihan internasional bagi peserta didik berprestasi agar mampu mengembangkan wawasan global dan kompetensi internasional. Pemerintah juga perlu memastikan adanya mekanisme pembinaan dan reintegrasi bagi lulusan Sekolah Garuda agar potensi dan pengetahuan yang mereka peroleh di luar daerah maupun luar negeri dapat dikontribusikan kembali untuk kemajuan Kalimantan Selatan.

M | Isu Ketahanan Pangan meliputi:

Dengan keterbatasan sumber daya manusia dibandingkan luasnya lahan pertanian. bantuan alat dan mesin di

dan meningkatkan efisiensi serta produktivitas pertanian.

N | Rekomendasi Ketahanan Pangan, diperlukan:

Pemerintah perlu mengatur mekanisme distribusi alsintan agar tepat sasaran, menyediakan pelatihan teknis bagi petani agar mampu mengoperasikan dan merawat peralatan dengan baik, serta membentuk unit layanan alsintan di tingkat desa atau kelompok tani guna memastikan ketersediaan dan pemeliharaan yang berkelanjutan.

O | Isu Ketahanan Energi, meliputi:

Belum ada perubahan/tetap dibandingkan periode sebelumnya. Terdapat 2 pembangkit bio energi berjenis biomassa dengan jaringan *off grid* (tidak terhubung langsung dengan jaringan umum) di Kabupaten Tabalong dengan total kapasitas 2,6 MW, yaitu: Pembangkit pertama dikelola oleh PT. Cakung Permata Nusa I (ATA) di desa Kasiau dengan kapasitas 1,1 MW; dan Pembangkit kedua dikelola oleh PT. Astra Agro Lestari di desa Hayub dengan kapasitas 1,6 MW.

P | Rekomendasi Ketahanan Energi, diperlukan:

Pemerintah daerah perlu memfasilitasi integrasi lokal, misalnya melalui penyediaan jaringan distribusi mini-grid atau skema off-taker lokal, agar listrik yang dihasilkan dapat dimanfaatkan masyarakat dan industri di sekitar lokasi.

Progres Peluang Investasi Daerah s.d. 31 Oktober 2025

1. Progres peluang investasi daerah s.d. 31 Oktober menunjukkan 4 peluang investasi, sama dengan bulan sebelumnya, dengan perkiraan total nilai investasi sebesar Rp5,72 triliun, tidak berubah dari pemetaan bulan sebelumnya. Dari 18 sektor lapangan usaha, peluang investasi tersebut tersebar di 3 lapangan usaha, didominasi oleh Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sejumlah 2 peluang investasi (50% dari total peluang investasi) dengan perkiraan nilai investasi sebesar Rp202,07 miliar (3,53% dari total perkiraan nilai investasi).

2. Laporan APID terkait Pengelolaan Limbah Medis (B3) Banjarbaru telah disampaikan ke Dit. SMI pada tahun sebelumnya namun belum ada tindak lanjut dari Dit. SMI. Tiga peluang investasi lainnya belum ada update tindak lanjut.

No	Sektor	Peluang Investasi	Perkiraan Nilai Investasi (satuan Rp)
1	Industri Pengolahan	Smelter Slab Billet Steel Kab. Tanah Bumbu	5.520.000.000.000
2	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	SPAM Regional Banua Enam Bendungan Tapin	197.772.720.000
3	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Pengelolaan Limbah Medis (B3) Banjarbaru	4.294.967.295

4	Transportasi dan Pergudangan	Pergudangan, Pusat Distribusi Banjarmasin	300.000.000
Total			5.722.322.687.295

HASIL ANALISIS MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)

Analisis MBG

Terdapat kenaikan jumlah SPPG semula 138 menjadi 178, jumlah supplier semula 96 menjadi 168, dan penerima manfaat semula 398.947 menjadi 476.844 penerima.

Telah dilaksanakan FGD antara KPPN Tanjung, SPPG, Pemda, BPOM, BPS dan Kemenag pada tanggal 6 November 2025.

Telah dilaksanakan monev dan survei bersama Tim Direktorat Pelaksanaan Anggaran pada SPPG Banjar Karang Intan Padang Panjang Kab Banjar pada tanggal 20 November 2025.

Pada Kabupaten Barito Kuala telah dibangun 4 SPPG dan 2 SPPG telah mulai beroperasi dan 2 SPPG ditargetkan beroperasi bulan November.

Isu dan Rekomendasi MBG

A | Isu MBG, meliputi:

Terdapat informasi keterlambatan pembayaran gaji para pegawai SPPG dikarenakan adanya pergantian pejabat pengelola keuangan di internal BGN. Di SPK tanggal 6 November 2025, tetapi baru dicairkan tanggal 16 November 2025.

B | Rekomendasi MBG, diperlukan:

BGN RI agar selalu memitigasi secara detail dampak kebijakan internal terhadap kinerja program MBG secara nasional termasuk meminimalisir dampak informasi negatif terhadap program prioritas pemerintah.